

**LAPORAN AKTIVITAS MAGANG**  
**PADA DIVISI ANALISIS DAN PELAPORAN KEUANGAN, DEPARTEMEN**  
**KEUANGAN INTERN, BANK INDONESIA KANTOR PUSAT JAKARTA**

*Disusun untuk Memenuhi Syarat Mata Kuliah Magang*

*Program S1 Jurusan Akuntansi*

**Oleh:**

**Arief Herbudi Fanaela**

**1202124005**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Aktivitas Magang

PADA DIVISI ANALISIS DAN PELAPORAN KEUANGAN, DEPARTMEN  
KEUANGAN INTERN, BANK INDONESIA KANTOR PUSAT JAKARTA

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat.



Disusun Oleh :

Arief Herbudi Fanaela

1202124005

Bandung, 4 Agustus 2015

Menyetujui :

PEMBIMBING MAGANG  
Divisi APK Bank Indonesia

**Sri. H. R. Pahlevi**

PEMBIMBING MAGANG  
Universitas Telkom

**Sulistijono, SH., MH**

Diketahui oleh:

KAPRODI S1 AKUNTANSI

**Deannes Isnuwardana, SE., MM**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan magang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2015.

Laporan magang ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan di Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah magang pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung.

Penyusunan Laporan Magang ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu, Bapak dan segenap keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk moril dan materil serta cinta dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Bapak Deannes Isynuwardhana, SE., MM. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
3. Bapak Sulistijono, SH., MH. selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing serta memberikan petunjuk dalam menyusun laporan magang ini.
4. Ibu Sri. H. R. Pahlevi selaku pembimbing laporan magang di Bank Indonesia yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing serta memberikan petunjuk dalam menyusun laporan magang ini.
5. Ibu Meiyana. B. Sobari selaku pembimbing selama kegiatan magang di Bank Indonesia.
6. Ibu Tita Damayanti selaku penerima kegiatan magang di Bank Indonesia.

7. Ibu Any, Ibu Dani, Ibu Eri, Mas Yan, Mba Ayu, Mba Suci, Mba Dina, dan Mba Erni dari Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga.
8. Dhea dan Putri selaku rekan Praktek Kerja Lapangan pada Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan
9. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi 2012 yang selalu kompak, khususnya Akuntansi A 2012
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyusun laporan magang ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu, segala kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, 11 Agustus 2015

Arief Herbudi Fanaela

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
<b>BAB I GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Profil Bank Indonesia.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Visi dan Misi Bank Indonesia.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Struktur Organisasi.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Strategi Bisnis .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Aspek Praktik Manajemen.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Bank Sentral .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Analisis Laporan Keuangan.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III AKTIVITAS DAN PENUGASAN MAGANG.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Latar Belakang Pelaksanaan Magang .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Tujuan Pelaksanaan Magang.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Manfaat Pelaksanaan Magang.....</b>	<b>36</b>
<b>D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang.....</b>	<b>37</b>
<b>E. Deskripsi Tugas Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan.....</b>	<b>38</b>
<b>F. Aktivitas Magang.....</b>	<b>41</b>
<b>G. Deskripsi Kegiatan Magang .....</b>	<b>52</b>
<b>H. Relevansi Teori Dengan Praktek.....</b>	<b>58</b>
<b>I. Permasalahan yang dihadapi .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 NILAI NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA .....	10
TABEL 3.1 TABEL AKTIVITAS MAGANG .....	41

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia.....	5
GAMBAR 1.2 Dewan Gubernur Bank Indonesia.....	6
GAMBAR 1.33 Pilar Bank Indonesia.....	11

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.....	68
LAMPIRAN 2	Laporan Surplus Defisit Bank Indonesia per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 201.....	69
LAMPIRAN 3	Daftar Penyajian Kembali Pos-Pos Akuntansi Kewajiban pada LKTBI 2014 .....	72
LAMPIRAN 4	Daftar Penyajian Kembali Pos-Pos Akuntansi Kewajiban pada LKTBI 2014.....	76



## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA**

#### **A. Profil Bank Indonesia**

Bank Indonesia (dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Nasionalisasi De Javasche Bank NV pada bulan Desember 1951 ditindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia tanggal 2 Juni 1953 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk bertindak sebagai bank sentral Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, khususnya politik, berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian maupun perubahan Undang-undang mengenai Bank Indonesia, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang, yang selanjutnya disebut Undang-undang Bank Indonesia.

Tidak hanya pada tataran Undang-undang, ihwal bank sentral juga menjadi substansi Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-undang.

Dengan landasan konstitusional yang jelas dan kuat tersebut maka sebagai implementasi dari amanat UUD 45 Pasal 23D, selain statusnya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, juga diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta dinyatakan sebagai badan hukum agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) guna dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.

Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Bank Indonesia tersebut di atas adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2009, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas yang diatur pada Pasal 8, yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Adapun tugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut dinyatakan antara lain bahwa lingkup

pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain mikroprudensial, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum bank, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya, serta penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important* bank.

Adapun dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk kategori *systemically important* bank dan/atau bank lainnya, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. Visi dan Misi Bank Indonesia**

Sebagai Bank Sentral yang mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia menerapkan visi dan misi untuk mencapai tujuan tersebut. Visi dan Misi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

### **1. Visi**

Menjadi lembaga Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

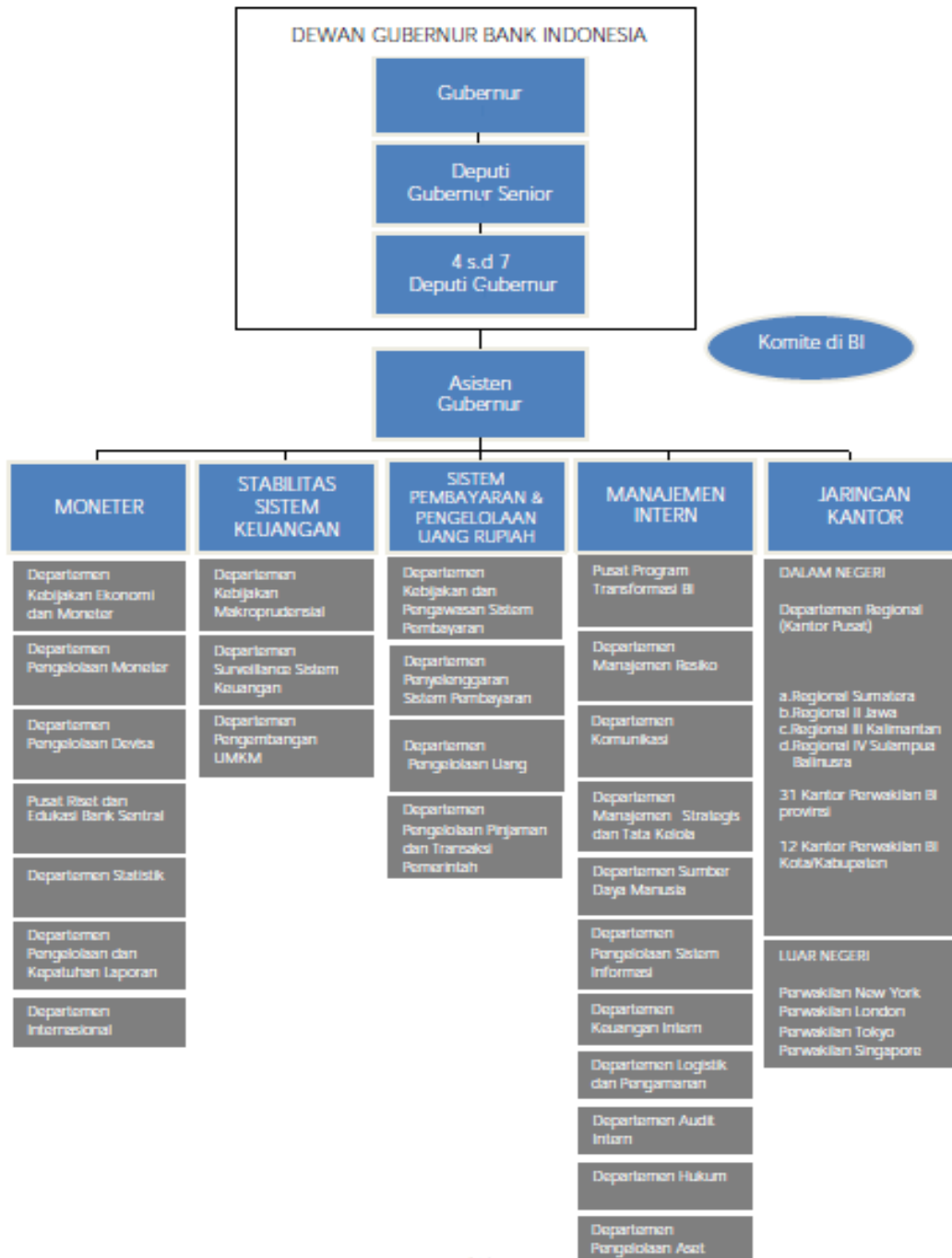
### **2. Misi**

- a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

- c. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
- d. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-undang.

## C. Struktur Organisasi

### 1. Struktur Organisasi Bank Indonesia



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia**  
(Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2014)

## 2. Dewan Gubernur Bank Indonesia



Gubernur :  
Agus D.W. Martowardojo



Deputi Gubernur Senior :  
Mirza Adityaswara



Deputi Gubernur :  
Ronald Waas



Deputi Gubernur :  
Perry Warjiyo



Deputi Gubernur :  
Hendar



Deputi Gubernur :  
Erwin Rijanto

**Gambar 1.2**  
**Dewan Gubernur Bank Indonesia**

(Sumber : <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/dewan-gubernur> diakses pada tanggal 4 Agustus 2015)

## 3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh

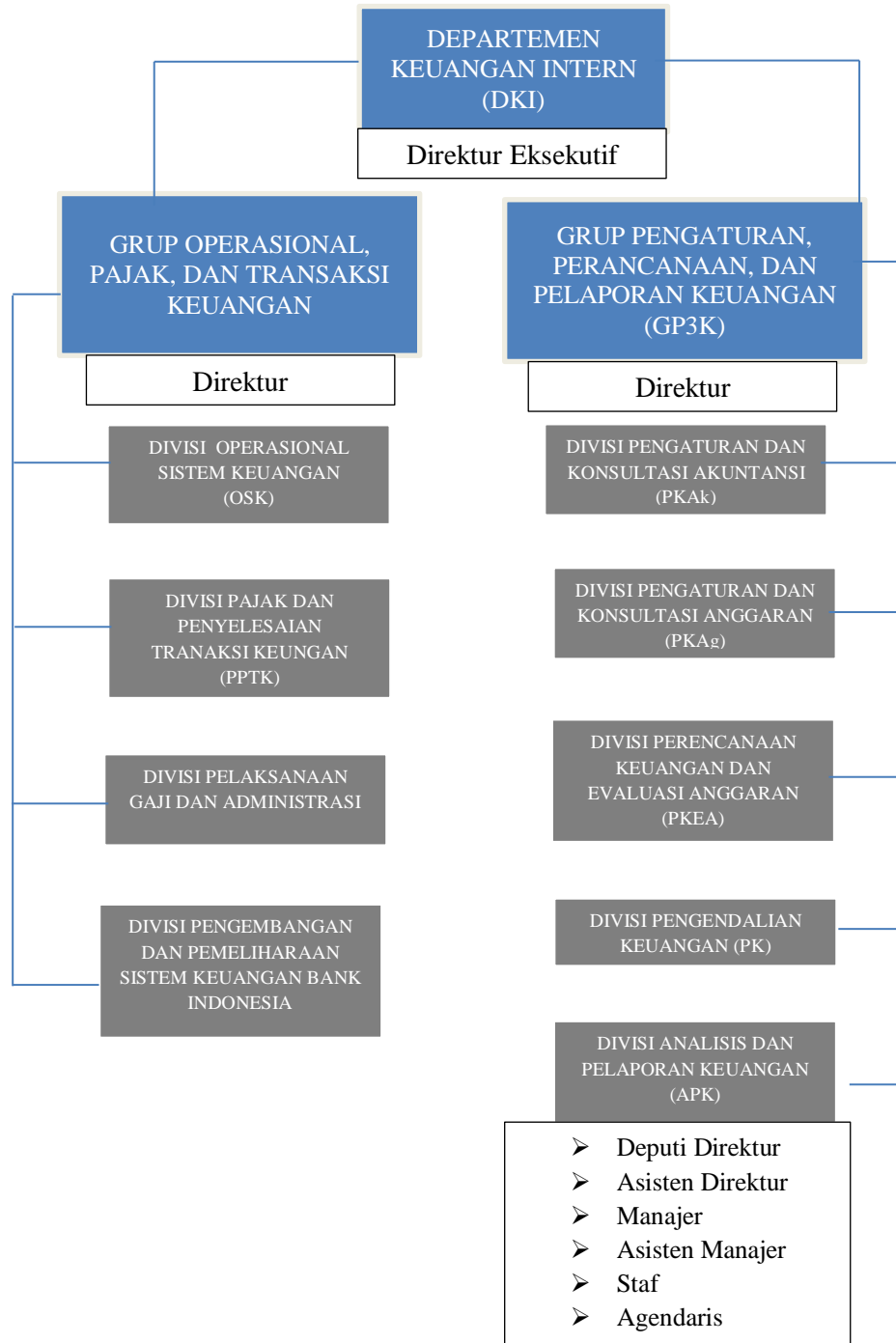
Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.

#### **4. Pengambilan Keputusan**

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

## 5. Struktur Organisasi Departemen Keuangan Intern





#### **D. Strategi Bisnis**

Karakteristik bisnis Bank Indonesia adalah *Non Profit Oriented*, yaitu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

Untuk itu strategi bisnis yang fokus dilakukan adalah untuk bagaimana caranya mewujudkan Visi dan Misi Bank Indonesia, yang diwujudkan dengan menggunakan Sasaran Strategis Bank Indonesia. Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu:

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
2. Menjaga stabilitas nilai tukar
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
4. Menjaga Stabilitas Ssistem Keuangan yang didukung dengan penguatan *surveillance* Sistem Pembayaran
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
6. Memelihara Sistem Pembayaran yang aman, efisien, dan lancar
7. Memperkuat pengelolaan keuangan Bank Indonesia yang akuntabel
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan *governance*
9. Mempercepat ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan

Selain itu Bank Indonesia juga memiliki nilai nilai strategis, yaitu:

*Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest –  
Coordination and Teamwork*

<b>NILAI – NILAI STRATEGIS</b>	<b>PENJELASAN</b>
<i>TRUST</i> (KEPERCAYAAN)	Meraih kepercayaan <i>stakeholders</i> dan membangun hubungan yang transparan dan akuntabel secara konsisten dan berkesinambungan
<i>INTEGRITY</i> (INTEGRITAS)	Bersikap, bertindak, dan berkata sebenarnya sesuai norma hukum dan etika
<i>PROFESSIONALISM</i> (PROFESIONALISME)	Menyelesaikan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan tingkat kompetensi yang mumpuni
<i>EXCELLENCE</i> (KESEMPURNAAN)	Senantiasa mengembangkan dan memperbaiki diri di seluruh aspek sehingga mampu mencapai kesempurnaan dalam menghasilkan kinerja dengan kualitas terbaik
<i>PUBLIC INTEREST</i> (KEPENTINGAN PUBLIK)	Menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai prioritas utama
<i>COORDINATION &amp; TEAMWORK</i> (KOORDINASI DAN KERJA SAMA)	Senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan <i>stakeholder</i> eksternal dan internal demi kepentingan bersama

**Tabel 1.1**  
**Penjelasan Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia**  
(Sumber : <http://www.bi.go.id/id/publikasi> )

## **E. Aspek Praktik Manajemen**

### **1. Aspek Jasa**

Jasa Bank Indonesia dapat tercermin dalam Tujuan dan Tugas Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas

tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien



**Gambar 1.3**  
**3 Pilar Bank Indonesia**  
(Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang

disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (*BI Rate*). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Berikut ini adalah penjelasannya:

#### 1) Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah.

Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

#### 2) Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.

#### 3) Peran sebagai *Lender of The Last Resort*

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai *lender of the last resort*. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

#### 4) Kebijakan Nilai Tukar

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

#### 5) Pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional.

Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portfolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa.

Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang lebih baik.

#### 6) Kredit Program

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia.

Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan perhatian pada pencapaian sasaran-sasaran moneter serta agar dapat tercipta pembagian tugas yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

#### b. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*.

Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di Indonesia didominasi oleh piranti pembayaran berbasis warkat, namun dalam perkembangannya piranti elektronik mulai banyak berperan terutama sejak dioperasikannya sistem BI-RTGS pada bulan November untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau *urgent*.

Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

c. Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

- 1) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan



suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

- 2) Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan.

Kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan.

Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

- 3) Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan

tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

- 4) Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

- 5) Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort*. Fungsi *Lender of the last resort* merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai *Lender of the last resort* mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis.

Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi *Lender of the last resort* dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *Lender of the last resort*, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut

## **2. Aspek Sumber Daya Manusia**

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Satuan kerja di Bank Indonesia per 31 Desember 2014 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) satuan kerja di Kantor Pusat, dan 43 (empat puluh tiga) Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, dan 12 (dua belas) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten, serta 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia. Jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2014 sebanyak 5.924 pegawai, termasuk diantaranya 1.113 pegawai yang ditugaskan pada Otoritas Jasa Keuangan.

## **3. Aspek Keuangan**

Bank Indonesia sebagai instansi independen yang berada di luar pemerintah Republik Indonesia tidak memperoleh dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai dana untuk menjalankan kegiatan operasional. Bank Indonesia memperoleh dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya antara lain dari hasil pengelolaan aset valuta asing, tagihan eks kredit likuiditas Bank Indonesia dan penerimaan administrasi.

Sepanjang 2014, Bank Indonesia mencatat surplus setelah pajak sebesar Rp41,2 triliun. Surplus bersih yang diperoleh bank sentral pada tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 10,2% dari tahun 2013 yang senilai Rp37,4 triliun.

Kegiatan operasional Bank Indonesia dibuat dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI). Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **4. Aspek Akuntabilitas**

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun, mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap triwulan atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat. Disamping itu, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diteliti dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Bank Indonesia juga diwajibkan menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Masih merupakan bagian dari transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai publikasi seperti Laporan Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan Moneter Triwulanan, Laporan Triwulanan Perkembangan Kebijakan Moneter, dan Laporan Tahunan.

Disamping itu, Bank Indonesia juga telah mempunyai homepage sendiri (<http://www.bi.go.id>) yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin memperoleh informasi mengenai Bank Indonesia.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

### **A. Bank Sentral**

#### **1. Pengertian Bank Sentral**

Dalam definisi yang paling sederhana menurut Singleton (2011:7), bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk *settlement* pembayaran antar bank.

Menurut Hawke (1973:12), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan.

Sementara di Indonesia peraturan yang paling dasar yang mengatur tentang bank sentral terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23D yang berisi: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-undang.

Bank Sentral tidak dapat diartikan sebagai Bank pada umumnya, tempat dimana kita menyimpan dan mengambil uang. Tujuan Bank umum adalah sama seperti pada kebanyakan perusahaan lainnya, yaitu untuk mendapatkan laba. Namun di Bank Sentral hal ini bukanlah tujuan utama. Bank sentral sebagai bank milik pemerintah tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba, melainkan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu seperti mengawasi bank, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, menjaga kestabilan tingkat harga, yang akhirnya berujung pada pertumbuhan ekonomi. Maka dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk menjalani fungsi yang sama dengan pemerintah.

#### **2. Tugas Bank Sentral**

Tujuh area utama tugas bank sentral (McKinley dan Banaian, 2005:32)

- a. Pengendalian kebijakan moneter;
- b. Pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa;
- c. Agen fiskal
- d. Sebagai *lender of last resort*;

- e. Mengawasi dan mengatur perbankan;
- f. Mengelola sistem pembayaran;
- g. Mengelola dan memelihara mata uang;

Sementara pada Bank Indonesia, memiliki tujuan dan tugas yang sama seperti yang di jelaskan diatas, yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan Nomor 6 tahun 2009

- a. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- c. Mengatur dan mengawasi Bank

Tugas Pokok Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dialihkan kepada OJK dan efektif sejak 31 Desember 2013. Bank Indonesia selanjutnya berfokus pada Stabilitas Sistem Keuangan.

### **3. Independensi Bank Sentral**

Independensi Bank Sentral mengacu pada kebebasan pembuatan kebijakan moneter dari pengaruh langsung baik dari politik atau pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Bank Sentral. Dalam menjawab tantangan ini solusinya adalah dengan memberi bank sentral karakter yang ternasuk komitmen kuat untuk menjaga stabilitas harga dengan cara memberikan kebebasan dalam mencapainya. Hal ini termasuk peran pemerintah dalam memberikan tujuan yang harus dicapai, sementara bank sentral tidak dapat menentukan tujuanl yang harus dicapai, tetapi bank

sentral harus sanggup dalam mencapai tujuan yang telah diberikan. Jadi tujuan independensi bank sentral adalah untuk mencegah adanya intervensi jangka pendek dari pemerintah.

Bank Indonesia mulai menjadi Bank Sentral yang independen sejak tahun 1999, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berlaku mulai 17 Mei 1999 dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan Bank Indonesia status dan kedudukan penuh sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bebas dari campur tangan pemerintah, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

Independensi ini memberikan Bank Indonesia otonomi penuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pihak manapun, tanpa terkecuali pemerintah tidak berhak untuk mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berhak untuk menolak dan mengabaikan intervensi apapun dari pihak manapun juga.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, dapat disimpulkan Bank Indonesia memiliki lima independensi, yaitu:

a. Independensi Kelembagaan (*Institutional Independence*):

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain.

b. Independensi Sasaran Akhir (*Goal Independence*):

Dari segi ini Bank Indonesia dianggap kurang independen karena sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 penetapan sasaran inflasi dilakukan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

c. Independensi Instrumen (*Instrument Independence*):



Dalam mencapai sasaran inflasi, Bank Indonesia bebas menetapkan sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan instrumen moneter yang lazim digunakan bank sentral.

d. Independensi Personal (*Personal Independence*):

Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur juga berkewajiban untuk atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

e. Independensi Keuangan (*Financial Independence*):

Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran kegiatan operasional dan anggaran kebijakan. Anggaran kegiatan operasional dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

## **B. Analisis Laporan Keuangan**

### **1. Analisis Keuangan**

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:16) Analisis Keuangan (*Financial Analysis*) merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan dimasa depan.

Lebih lanjut dalam buku Analisis Laporan Keuangan karangan Subramanyam dan Wild (2010:16)), Analisis keuangan terdiri atas tiga bagian besar, yaitu:

a. Analisis Profitabilitas (*Profitability Analysis*)

Analisis profitabilitas merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, dan melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak berbagai pemicu profitabilitasnya. Selain itu analisis ini juga mencakup evaluasi atas dua sumber utama profitabilitas, yaitu:

1) Margin (bagian dari penjualan yang tidak tertutup oleh biaya)

2) Perputaran (penggunaan modal)

Analisis profitabilitas juga berfokus pada penyebab perubahan profitabilitas dan daya tahan laba.

b. Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

Analisis risiko merupakan evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Analisis risiko melibatkan penilaian atas solvabilitas dan likuiditas perusahaan sejalan dengan variasi laba.

c. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana

Analisis sumber dan penggunaan dana, atau sering juga disebut dengan analisa aliran dana, merupakan alat analisa financial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

## 2. Analisis Rasio

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:43) Analisis Rasio (*Ratio Analysis*) merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Sebuah rasio menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas. Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis keuangan, sementara yang lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri spesifik. Berikut ini adalah analisis rasio untuk diterapkan pada tiga area penting analisis laporan keuangan:

a. Analisis Kredit (Risiko)

1) Likuiditas. Untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek

2) Struktur modal dan solvabilitas. Untuk menilai kemampuan memenuhi jangka panjang

b. Analisis Profitabilitas

- 1) Tingkat pengembalian atas investasi (*return on investment – ROI*). Untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang.
- 2) Kinerja operasi. Untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi.
- 3) Pemanfaatan asset (*asset utilization*). Untuk menilai efektivitas dan intensitas asset dalam menghasilkan penjualan, disebut pula perputaran (*turnover*).

c. Valuasi

Untuk mengestimasi nilai intrinsic perusahaan (saham)

## C. Laporan Keuangan

### 1. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut kerangka konseptual Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994 tujuan pelaporan keuangan dinyatakan sebagai “Tujuan Laporan Keuangan”. Tujuan tersebut dinyatakan dalam paragraf ke-12, 13, dan 14 seperti berikut ini:

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen

berbuat demikian, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

- d. Ada perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994 dan *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 dalam menyatakan tujuan pelaporan keuangan. SAK 1994 memakai istilah “Tujuan Laporan Keuangan” (*financial statement*), sedangkan FASB menyatakan dengan “*Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*”.
- e. *Financial Statement* dan *financial reporting* adalah dua hal yang memiliki makna yang tidak sama artinya. *Financial statement* adalah hasil suatu proses sistem akuntansi, atau hasil suatu kegiatan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tidak mempunyai tujuan, tetapi yang mempunyai tujuan adalah penyajian laporan keuangan (*financial reporting*). Laporan keuangan adalah seperangkat laporan yang terdiri dari laporan neraca, laba-rugi, dan perubahan posisi keuangan serta laporan aliran kas. Dengan demikian *financial reporting* tidak sama dengan *financial statement*.
- f. *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menyadari bahwa antara dua istilah tersebut mempunyai makna berbeda. Hal ini diungkapkan dalam SFAC No. 1 paragraph ke-5-8. Dalam paragraph ke-6 dijelaskan bahwa *financial statement* merupakan fokus utama *financial reporting*. Dengan demikian *financial reporting* mempunyai cakupan yang lebih luas dari *financial statement*, karena *financial statement* hanyalah merupakan *central feature* dari *financial reporting*.
- g. *Financial statements are a central feature of financial reporting. They are a principal means of communicating accounting information to those outside of enterprises.*

- h. Dalam paragraph ke-7 SFAC No. 1, FASB menyatakan bahwa *financial reporting* tidak hanya terdiri dari *financial statement*, tetapi juga informasi lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi.

## **2. Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 paragraf 11 tahun 2013 tentang laporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap harus terdiri dari:

Laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Laporan Posisi Keuangan (neraca) pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi komprehensif laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
  - ea. Informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 36 dan 36A; dan
- f. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

## **D. KAKBI**

### **1. Gambaran Umum KAKBI**

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) adalah suatu prinsip yang mengatur praktik akuntansi yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan perlakuan akuntansi yang sesuai atas kelompok

transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan *governance* melalui laporan keuangan yang didukung oleh pedoman akuntansi yang relevan dan *reliable*, Bank Indonesia membentuk suatu Komite yang independen yang bertugas untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), yang mengadopsi standar akuntansi keuangan umum dengan modifikasi untuk menyesuaikan dengan karakteristik unik Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Latar belakang terbentuknya KAKBI:

- a. Kebutuhan untuk meningkatkan *governance* dalam penyusunan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di Bank Indonesia.
- b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang berbeda dengan entitas komersial yang tidak dapat diakomodasi oleh standar akuntansi komersial.
- c. Penguatan payung hukum pengaturan akuntansi di Bank Indonesia.

Di Negara-Negara lain seperti Malaysia, Filipina, Laos, Thailand, dan Singapura tidak ada Kebijakan Akuntansi Bank Sentral khusus yang mengatur Akuntansi Bank Sentral, mereka menggunakan IFRS yang dimodifikasi khusus untuk mengakomodir keunikan akuntansi mereka. Negara yang telah menggunakan Kebijakan Akuntansi Bank Sentral adalah Amerika Serikat, yang diberi nama *Financial Accounting Manual for Federal Reserve Bank* (FAM) yang disusun oleh Internal dari Bank Sentral Amerika.

Sementara di Bank Indonesia, yang menyusun KAKBI adalah Komite Penyusun KAKBI, yang komposisinya terdiri dari:

- a. Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI)

- b. Narasumber Ahli Akuntansi Pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan/KSAP)
- c. Praktisi (Kantor Akuntan Publik/KAP yang terdiri dari Deloitte, PwC, EY, KPMG)
- d. Akademisi
- e. Bank Indonesia

Kerangka dasar pelaporan keuangan Bank Indonesia diatur dalam Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) yang merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi Bank Indonesia yang bersifat konvensional dan unik.

Transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik adalah:

- a. Transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai bank sentral;
- b. Transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank Indonesia dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 ditetapkan KAKBI. KAKBI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 secara prospektif, artinya penerapan kebijakan akuntansi baru digunakan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal tersebut.

KAKBI terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) sebagai prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia, dan seperangkat Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) yang merupakan pengaturan perlakuan akuntansi transaksi spesifik. PKAK tersebut terdiri dari:

- a. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.

- b. PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan PKAK.

Sesuai dengan PKAK 02 paragraf 83 diatur bahwa penyajian kembali laporan keuangan satu periode sebelumnya dipersyaratkan sebagai informasi komparatif.

c. PKAK 03: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini dalam akuntansi transaksi dan saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik. Untuk akuntansi transaksi dan saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi yang bersifat tidak unik, Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi umum.

d. PKAK 04: Emas

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi emas yang berupa emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan. Untuk akuntansi instrumen keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar emas, Bank Indonesia menerapkan PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan.

e. PKAK 05: Uang Dalam Peredaran

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi uang dalam peredaran yang meliputi kegiatan pengedaran, pencabutan dan penarikan uang Rupiah.

f. PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk seluruh jenis instrumen keuangan untuk pelaksanaan kebijakan kecuali uang Rupiah dalam penguasaan Bank Indonesia sesuai dengan PKAK 05: Uang Dalam Peredaran.

g. PKAK 07: Transaksi Tidak Unik

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi transaksi konvensional dan tidak unik di Bank Indonesia. \\



**2. Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia berdasarkan KAKBI (Paragraf 28 dan 29)**

- a. Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.
- b. Laporan keuangan Bank Indonesia yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna. Akan tetapi, laporan keuangan Bank Indonesia tidak menyediakan semua informasi yang mungkin diperlukan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian pada masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

**3. Unsur Laporan Keuangan Bank Indonesia Berdasarkan KAKBI (Paragraf 66 dan 88)**

a. Posisi Keuangan

Unsur posisi keuangan adalah aset dan liabilitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh Bank Indonesia sebagai akibat peristiwa masa lalu dan mencerminkan hak Bank Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang berdampak ekonomi dan sosial kepada masyarakat dan perekonomian nasional.
- 2) Liabilitas adalah klaim kini terhadap Bank Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda yang timbul dari peristiwa masa lalu.

b. Surplus/Defisit

Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan akumulasi surplus/defisit, yang tidak berasal dari penambahan modal.
- 2) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas, yang mengakibatkan penurunan akumulasi surplus/defisit.

## **BAB III**

### **AKTIVITAS DAN PENUGASAN MAGANG**

#### **A. Latar Belakang Pelaksanaan Magang**

Untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ketatnya persaingan dalam dunia kerja mengharuskan setiap orang untuk mempunyai kemampuan akademis yang unggul yang didukung dengan kemampuan *soft-skill* yang dapat menambah nilai diri. Untuk itu Program Akuntansi Universitas Telkom mewajibkan para mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan magang sebagai salah satu syarat akademik kampus. Program magang atau Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademis dan *soft-skill* para mahasiswanya. Tujuan utama dari Magang atau Praktek Kerja Lapangan adalah untuk memfasilitasi para Mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar kelas. Kesempatan ini dapat di manfaatkan untuk mengaplikasikan teori yang selama ini dipelajari dalam kelas ke dalam dunia nyata.

Aktivitas pelaksanaan magang dilakukan pada Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta, yang didasarkan pada rasa keingintahuan tentang aktivitas di Bank Indonesia. Selanjutnya penulis ditempatkan pada Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan - Grup Pengaturan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan – Departemen Keuangan Intern, dengan ditempatkan pada divisi ini, maka penulis dapat mengetahui gambaran secara keseluruhan mengenai aktivitas transaksi keuangan apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Penulis juga dapat memahami penjelasan mengenai pos-pos atau akun yang terdapat pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit – Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia.

#### **B. Tujuan Pelaksanaan Magang**

##### **1. Tujuan Bagi Mahasiswa Universitas Telkom:**

- a. Menyelesaikan salah satu syarat akademik dalam studi di Universitas Telkom;

- b. Dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori yang selama ini dipelajari dalam kelas dan selama kegiatan perkuliahan;
- c. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga di dunia kerja yang dapat dijadikan dasar karir yang ingin dicapai mahasiswa.

**2. Tujuan bagi Universitas Telkom:**

- a. Dapat menjalin kerja sama dan menumbuhkan citra positif antara Bank Indonesia atau instansi yang dijadikan tempat magang oleh para mahasiswanya dan Universitas Telkom.
- b. Mendapatkan feedback dari mahasiswa atas kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa ketika magang berupa informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan akademik.

**3. Tujuan bagi Bank Indonesia:**

- a. Menjalinkan kerja sama dan hubungan baik antara Bank Indonesia dan lembaga pendidikan;
- b. Dapat menjadikan program magang ini sebagai salah satu sumber perekrutan Sumber Daya Manusia bagi Bank Indonesia;
- c. Mendapat tenaga bantuan baru untuk melaksanakan kegiatan Bank Indonesia.

**C. Manfaat Pelaksanaan Magang**

**1. Manfaat bagi Mahasiswa Universitas Telkom:**

- a. Sebagai media untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan dari ilmu yang di dapat dari proses perkuliahan dan kenyataannya di dunia nyata; dan
- b. Mengetahui kehidupan di dunia kerja dan budaya di organisasi Bank Indonesia sehingga dapat menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri jikalau nanti memasuki dunia kerja.

**2. Manfaat bagi Universitas Telkom:**

- a. Sebagai media bagi Universitas Telkom untuk terus meningkatkan kualitas akademiknya melalui masukan yang datang dari para mahasiswa yang telah melaksanakan program magang;

- b. Menumbuhkan citra positif di Bank Indonesia/ instansi yang bersangkutan sehingga dapat memberi respon yang baik untuk para alumni Universitas Telkom ketika perekrutan karyawan suatu saat nanti;
  - c. Dapat menjadi jembatan bagi para mahasiswa yang ingin melaksanakan magang di perusahaan/instansi terkait pada periode berikutnya; dan
  - d. Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan perusahaan/intansi yang terkait pada masa yang akan datang.
3. **Manfaat bagi Bank Indonesia:**
- a. Mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu pekerjaan yang membutuhkan SDM lebih tanpa harus melakukan perekrutan karyawan;
  - b. Dapat menciptakan hubungan baik dengan lembaga pendidikan untuk mendukung terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan; dan
  - c. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perekrutan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.

#### **D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang**

Kegiatan magang/Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta, bertempat di Gedung C lantai 10 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat. Aktivitas kegiatan Praktek Kerja Lapangan ditempatkan pada Departemen Keuangan Intern - Grup Pengaturan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan - Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2015 dengan total 32 hari kerja. Sesuai dengan syarat dari Universitas Telkom yaitu selama 30 hari kerja. Pelaksanaan aktivitas Praktek Kerja Lapangan penulis adalah hari Senin-Jumat pukul 07.10 s.d.

16.15, sedangkan untuk bulan Ramadhan terdapat penyesuaian jam kerja menjadi pukul 07.10 s.d. 15.45 WIB.

## **E. Deskripsi Tugas Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan**

Sebelum membahas tentang kegiatan magang yang dilakukan penulis pada Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan (Divisi APK), penulis akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tugas Divisi APK. Sesuai dengan namanya, tugas Divisi APK adalah menganalisis dan menyusun laporan keuangan. Adapun rincian tugas pokok dari Divisi APK antara lain:

### **1. Menyusun dan Menganalisis Laporan Keuangan Bank Indonesia**

Terdapat 2 (dua) jenis Laporan Keuangan Bank Indonesia yang dibuat oleh Divisi APK yaitu:

#### **a. Laporan Keuangan Interim Bank Indonesia**

Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim (periode 1 Januari s.d. 30 Juni). Tujuan dibuatnya Laporan Keuangan Interim yang disusun per 30 Juni adalah untuk pemakaian internal Bank Indonesia. Laporan Keuangan Interim ini disusun untuk mengetahui kondisi keuangan Bank Indonesia sampai dengan bulan Juni dan sebagai dasar pertimbangan bagi manajemen Bank Indonesia dalam pengambilan keputusan.

#### **b. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia**

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia adalah laporan keuangan lengkap yang disusun untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia dibuat untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia dipublikasikan kepada publik pada bulan Mei setiap tahunnya sesuai

dengan Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 61 ayat 4, yang berbunyi: Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

Agar Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat disajikan secara wajar, Divisi APK melakukan hal-hal sebagai berikut: Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait guna memperoleh informasi pendukung Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- 1) Melakukan identifikasi dan menetapkan jurnal penyesuaian berdasarkan KAKBI dalam rangka menyajikan laporan keuangan Tahunan dan Interim Bank Indonesia
- 2) Melakukan perhitungan Penurunan dan Pemulihan Nilai Aset Keuangan
- 3) Menyusun *Worksheet* (kertas kerja) Laporan Posisi Keuangan dan laporan Surplus Defisit
- 4) Melakukan analisis atas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Selain itu, Divisi APK juga berperan sebagai *Liason Officer* dalam pelaksanaan audit oleh auditor internal dan eksternal.

## **2. Menyusun dan Menganalisis Neraca Singkat Mingguan (NSM)**

Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999 menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia. Dalam rangka transparansi, Bank Indonesia diwajibkan Menyusun Neraca Singkat Mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Neraca Singkat dibuat setiap minggu dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. NSM Minggu ke-1 untuk periode laporan tanggal 1 s.d. 7
- b. NSM Minggu ke-2 untuk periode laporan tanggal 8 s.d.15
- c. NSM Minggu ke-3 untuk periode laporan tanggal 16 s.d. 23
- d. NSM Minggu ke-4 untuk periode laporan tanggal 24 s.d. akhir bulan yang bersangkutan.

### **3. Menyusun dan Menganalisis Laporan Rasio Modal Terhadap Kewajiban Moneter Bank Indonesia**

Setiap awal bulan Divisi APK membuat Laporan Rasio Modal Terhadap Kewajiban Moneter Bank Indonesia untuk guna memantau perkembangan rasio modal Bank Indonesia setiap bulannya. Hal ini mengingat adanya kewajiban Bank Indonesia untuk menyetorkan sisa surplus yang menjadi bagian Pemerintah apabila Rasio Modal terhadap Kewajiban Moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10%.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Bank Indonesia, surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
- c. Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- d. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter.
- e. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modalnya kurang dari Rp2,0 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya tersebut jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana pada angka 1) dan 2) diserahkan kepada Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan



bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

#### F. Aktivitas Magang

Pelaksanaan kegiatan magang ditempatkan pada pada Departemen Keuangan Intern – Grup Pengaturan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan – Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan. Selama pelaksanaan magang penulis diberi tugas sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Aktivitas Magang**

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang	Uraian Tugas	Output
1	Senin 1 Juni 2015	1. Penjelasan Gambaran Umum Bank Indonesia.	Diberi Penjelasan Umum mengenai Profil, Struktur Organisasi, Cara Kerja, <i>Jobdesk</i> setiap Satuan Kerja (Departemen), <i>Jobdesk</i> Divisi	Mendapat gambaran yang jelas mengenai Bank Indonesia
		2. Memeriksa Translasi LKTBI 2014.	Memeriksa translasi LKTBI yang akan di terbitkan dalam Bahasa Inggris.	Mendapat gambaran dan mengetahui Format LKTBI dalam Bahasa Inggris.
2	Rabu 3 Juni 2015	1. Membuat <i>historical</i> data LKTBI 2003 ke Ms. Excel.	Karena LKTBI 2003 belum ada file softcopy nya, maka di buatlah file di Ms Excel.	Mengetahui format LKTBI 2003 dan Posisi Keuangan tahun 2003.
		2. Memeriksa Lampiran Singkatan LKTBI 2014.	Di dalam CALK terdapat banyak Singkatan, maka di cek apakah singkatan yang terdapat telah sesuai dengan yang terdapat di	Mengetahui singkatan-singkatan yang terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan LKTBI 2014.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang	Uraian Tugas	Output
			lampiran.	
3	Kamis 4 Juni 2015	1 Membuat <i>historical</i> data LKTBI 2002 ke Ms. Excel.	Karena LKTBI 2002 belum ada file softcopy nya, maka di buatlah file di Ms Excel.	Mengetahui format LKTBI 2002 dan Posisi Keuangan tahun 2002.
		2. Memeriksa Translasi LKTBI 2014.	Sebelum Akhirnya dirilis, dilakukan pengecekan terhadap Translasi LKTBI 2014 (Seperti <i>Grammar Check</i> ) etc.	Dapat mengetahui dan menemukan kesalahan translasi yang terdapat pada CALK LKTBI 2014.
4	Jumat 5 Juni 2015	Memeriksa Translasi dan Singkatan LKTBI 2014.	Sebelum Akhirnya dirilis, dilakukan pengecekan terhadap Translasi LKTBI 2014 (Seperti <i>Grammar Check</i> ) etc, dan Singkatan yang terdapat pada CALK apakah lelah benar.	Dapat mengetahui dan menemukan kesalahan translasi dan singkatan yang terdapat pada CALK LKTBI 2014.
5	Senin 8 Juni 2015	Memeriksa Translasi dan Singkatan LKTBI 2014.	Sebelum Akhirnya dirilis, dilakukan pengecekan terhadap Translasi LKTBI 2014 (Seperti <i>Grammar Check</i> ) etc, dan Singkatan yang terdapat pada CALK apakah lelah benar.	Dapat mengetahui dan menemukan kesalahan translasi dan singkatan yang terdapat pada CALK LKTBI 2014.
6	Selasa 9 Juni 2015	1. Memindahkan Neraca Harian Tanggal 1	Format convert neraca yang dihasilkan dari sistem BI-SOSA	Mengetahui Neraca Harian Bank Indonesia dan mengetahui mana

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang	Uraian Tugas	Output
		Juni-8 Juni 2015 dari sistem BI-SOSA ke Ms. Word	masih berantakan, Untuk itu perlu dibuatkan versi yang rapih supaya dapat di mengerti	saldo yang naik dan yang turun setiap hari nya
		2. Memeriksa Rekening Koran Cadangan Tujuan	Terdapat selisih antara RKH CT dengan Anggaran yang ada, untuk itu perlu di check	Menemukan dan mengetahui beberapa kesalahan yang terdapat pada Rekening CT
7	Rabu 10 Juni 2015	Membuat Rekonsiliasi Rekening Cadangan Tujuan dengan Transaksi Bulan Mei 2014	Setelah menemukan kesalahan dan selisih pada Rek. CT maka membuat Rekonsiliasi Rekening Cadangan Tujuan dengan Transaksi di Ms. Excel	Dapat membuat Rekonsiliasi Rek. CT dengan Transaksi bulan Mei 2014
8	Kamis 11 Juni 2015	Memeriksa dan Membuat Rekonsiliasi Rekening Cadangan Tujuan dengan Transaksi Bulan April 2014	Setelah menemukan kesalahan dan selisih pada Rek. CT maka membuat Rekonsiliasi Rekening Cadangan Tujuan dengan Transaksi di Ms. Excel	Menemukan dan mengetahui beberapa kesalahan yang terdapat pada Rekening CT dan dapat membuat Rekonsiliasi Rek. CT dengan Transaksi bulan Mei April
9	Jumat 12 Juni 2015	Membuat Tabel Pos-Pos Akuntansi LKTBI 2014 dan Translasi Bahasa Inggris nya	Dengan adanya Perubahan acuan Standar Akuntansi Bank Indonesia dari PAKBI menjadi KAKBI maka terdapat banyak perubahan pos-pos Akuntansi di LKTBI, maka	Menjadi mengerti Pos-Pos Akuntansi apa saja yang berubah di PAKBI dan setelah menjadi KAKBI

<b>Hari ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Aktivitas Magang</b>	<b>Uraian Tugas</b>	<b>Output</b>
			dibuatlah Tabel yang menjelaskan perubahan antara Pos-Pos Akuntansi di PAKBI menjadi Pos-Pos Akuntansi yang terdapat pada KAKBI	
10	Senin 15 Juni 2015	Menambahkan SA, GEA, TC pada Rekonsiliasi CT & Anggaran Bulan Mei 2015	Rekonsiliasi yang sebelumnya telah dibuat masih perlu ditambahkan beberapa kolom untuk menambahkan informasi dan mempermudah pencarian	Menjadi mengetahui Sandi Akun, GEA, dan TC apa saja yang terdapat dalam Rekonsiliasi CT & Anggaran Bulan Mei 2015
11	Selasa 16 Juni 2015	Membuat NSM Bulan Januari-Mei	NSM yang dibuat setiap minggu dari sistem masih dalam format mingguan, untuk itu dibuatkan formatnya supaya berjejer dari Bulan Januari sampai Mei 2015	Mengetahui posisi NSM tiap minggunya dari Bulan Januari-Mei
12	Rabu 17 Juni 2015	Merekap Akun 569 (Sanksi Administrasi Perbankan)	Terdapat selisih dalam Akun 569 di sisi Kredit nya. Maka dilakukan rekap untuk mengetahui dimana selisihnya	Mengetahui mana akun yang memang sebenarnya Sanksi Administrasi Bank dan mana yang bukan
13	Kamis 18 Juni 2015	Membuat Laporan Kepatuhan dan Pengendalian Intern LKTBI 2013	Laporan Audit dari BPK terdapat temuan di tiap Departemen/Satuan Kerja nya. Maka dibuat Laporan	Mengetahui temuan dari BPK terhadap Bank Indonesia

<b>Hari ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Aktivitas Magang</b>	<b>Uraian Tugas</b>	<b>Output</b>
			Kepatuhan nya	
14	Jumat 19 Juni 2015	Membuat Manajemen Letter untuk Laporan Kepatuhan LKTBI 2013	Dari temuan BPK tersebut dibuat lah Manajemen Letter nya untuk merekap temuan tiap Divissi	Mengetahui temuan dari BPK terhadap Bank Indonesia
15	Senin 22 Juni 2015	Memformat CT Bulan November & Desember 2013 Akun 5 & 6	Data yang telah diambil dari sistem BI-SOSA masih berantakan dan belum layak untuk diolah. Oleh karena itu dibuat format nya untuk mempermudah dalam memahaminya	Mengetahui apa saja daftar isi CT Akun 5 & 6 dan bagaimana cara menyajikannya
16	Selasa 23 Juni 2015	Memformat CALK per 30 Juni 2015	Laporan Tengah Tahun yang akan di sajikan pada Bulan Juli memiliki format yang tidak jauh berbeda dengan CALK LKTBI 2014, Hanya terdapat perubahan di Jumlah Angka dan penjelasannya. Oleh karena itu CALK LKTBI 2015 di ubah sedikit sebelum nantinya akan dibuatkan Memo kepada setiap Satuan Kerja untuk mengisi bagian-bagian dari CALK Laporan Tengah	Mengetahui bagaimana proses Pelaporan Keuangan dan Pos-pos apa saja yang berhubungan dengan kegiatan setiap Satuan Kerja

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang	Uraian Tugas	Output
			Tahun sesuai dengan Kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan pos-pos yang berkaitan dalam Laporan Keuangan	
17	Rabu 24 Juni 2015	Memformat CT Januari-Agustus 2012 Akun 5,6,7	Data yang telah diambil dari sistem BI-SOSA masih berantakan dan belum layak untuk disajikan. Oleh karena itu dibuat format nya untuk mempermudah dalam memahaminya	Mengetahui apa saja daftar isi CT Akun 5, 6, 7 dan bagaimana cara menyajikannya
		Membuat NPV SKB	Pemerintah memiliki Surat Utang kepada Bank Indonesia dan akan dibayarkan Angsuran Pokok nya hingga tanggal Jatuh Tempo Agustus 2043. Untuk itu dibuatkan PV nya untuk mengetahui berapa Angsuran yang akan dibayar di masa yang akan datang dengan nilai sekarang	Mengetahui Angsuran Pokok yang dibayarkan pemerintah setiap 2 kali setahun dan mengetahui Nilai PV nya saat ini
18	Kamis 25 Juni 2015	Membuat <i>historical</i> data Neraca dan L/R 1982	Data Laporan Keuangan tahun 1982 dibuatkan Softcopy nya	Mengetahui Laporan Keuangan tahun 1982 dan menghasilkan Softcopy Laporan

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang	Uraian Tugas	Output
			dalam Ms. Excel	keuangan tahun 1982
		Memeriksa CALK LKTBI 2014	CALK yang akan dirilis dari percetakan di cek terlebih dahulu sebelum dirilis apakah telah sesuai dengan CALK yang dibuat oleh Bank Indonesia	Mengetahui finalisasi dari Pembuatan CALK LKTBI 2014
19	Jumat 26 Juni 2015	Membuat <i>historical</i> data Neraca dan L/R Tahun 1981 dan 1994	Data Laporan Keuangan tahun 1981 & 1994 dibuatkan Softcopy nya dalam Ms. Excel	Mengetahui Laporan Keuangan tahun 1981 & 1994 dan menghasilkan Softcopy Laporan keuangan tahun 1981 & 1994
20	Senin 29 Juni 2015	Menginput Membuat <i>historical</i> data Neraca dan L/R Tahun 1991	Data Laporan Keuangan tahun 1981 & 1994 dibuatkan Softcopy nya dalam Ms. Excel	Dapat Memahami Laporan Keuangan tahun 1981 & 1994 dan menghasilkan Softcopy Laporan keuangan tahun 1981 & 1994
21	Selasa 30 Juni 2015	1. Mengedit Memo Pengungkapan LKI 2015	1. Setiap Satuan Kerja akan diberikan arahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Interim Juni 2015, oleh karena itu DKI mengundang Departemen lain untuk hadir dalam rapat dan dibuatkan memo	Dapat membuat Memo untuk mengundang rapat

<b>Hari ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Aktivitas Magang</b>	<b>Uraian Tugas</b>	<b>Output</b>
			nya untuk dikirim ke setiap departemen	
		2. Memformat CT September-Desember 2012 Akun 5, 6,7	2. Data yang telah diambil dari sistem BI-SOSA masih berantakan dan belum layak untuk disajikan. Oleh karena itu dibuat format nya untuk mempermudah dalam memahaminya	Mengetahui apa saja daftar isi CT Akun 5, 6, 7 dan bagaimana cara menyajikannya
22	Rabu 1 Juli 2015	Memformat CT Tahun 2011 Akun 5,6,7	Data yang telah diambil dari sistem BI-SOSA masih berantakan dan belum layak untuk disajikan. Oleh karena itu dibuat format nya untuk mempermudah dalam memahaminya	Mengetahui apa saja daftar isi CT Akun 5, 6, 7 dan bagaimana cara menyajikannya
23	Kamis 2 Juli 2015	Memformat CT Tahun 2011 Akun 5,6,7	Data yang telah diambil dari sistem BI-SOSA masih berantakan dan belum layak untuk disajikan. Oleh karena itu dibuat format nya untuk mempermudah dalam memahaminya	Mengetahui apa saja daftar isi CT Akun 5, 6, 7 dan bagaimana cara menyajikannya



<b>Hari ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Aktivitas Magang</b>	<b>Uraian Tugas</b>	<b>Output</b>
24	Jumat 3 Juli 2015	Memeriksa dan mencari selisih CT-CU Juni 2015	Terdapat selisih sebesar Rp 529.000 antara CT dan Rubrik 4, maka dicari penyebabnya	Dapat mengetahui mengapa terjadi selisih
25	Senin 6 Juli 2015	Menerjemahkan sub-bab Risk Management CALK BIS	Dewan Gubernur menginginkan sub-bab Manajemen Risiko yang lebih lengkap dan mendalam di CALK. Maka dibutuhkan refrensi tentang Manajemen Risiko dari Bank Sentral lain. Maka dibuatlah terjemahannya	Mendapatkan referensi untuk subab Manajemen Risiko pada CALK
26	Selasa 7 Juli 2015	Menerjemahkan sub-bab Risk Management RBA	Dewan Gubernur menginginkan sub-bab Manajemen Risiko yang lebih lengkap dan mendalam di CALK. Maka dibutuhkan refrensi tentang Manajemen Risiko dari Bank Sentral lain. Maka dibuatlah terjemahannya	Mendapatkan referensi untuk subab Manajemen Risiko pada CALK
27	Rabu 8 Juli 2015	Membuat review dan comparison Manajemen Risiko BIS, RBA,RBNZ, BSM, BSP	Dewan Gubernur menginginkan sub-bab Manajemen Risiko yang lebih lengkap dan mendalam di CALK. Maka dibutuhkan refrensi tentang Manajemen	Mendapatkan referensi untuk subab Manajemen Risiko pada CALK

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang	Uraian Tugas	Output
			Risiko dari Bank Sentral lain. Maka dibuatlah komparasi sub-bab Manajemen Risiko BIS, RBA, RBNZ, BSM, BSP	
28	Kamis 9 Juli 2015	Memeriksa dan mencari selisih CT-CU Juni 2015	Terdapat selisih sebesar Rp 529.000 antara CT dan Rubrik 4, maka dicari penyebabnya	Mendapatkan selisih CT dan Rubrik 4 sehingga laporan kembali <i>balance</i>
		Membuat Jurnal Penyesuaian Penerimaan Giro untuk LKI 2015	Dalam membuat LKI 2015. Tanggal cut off ditentukan tanggal 30 Juni 2015. Namun masih terdapat transaksi yang baru di jurnal setelah tanggal 30 Juni 2015 namun masih mempengaruhi Laporan Posisi Keuangan Bulan Juni 2015. Maka dibuat lah Jurnal Penyesuaiannya.	Menghasilkan Jurnal Penyesuaian untuk pembuatan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit, Laporan Keuangan Interim 2015
29	Jumat 10 Juli 2015	1. Membuat rekapan dan Penyebab selisih CT Bulan Juni 2015	1. Terdapat selisih sebesar Rp 529.000 antara CT dan Rubrik 4, maka dicari penyebabnya dan dibuat rekapannya.	Mendapatkan penyebab selisih CT dan Rubrik 4 sehingga laporan kembali <i>balance</i>
		2. Membuat Jurnal Penyesuaian atas Aset	2. Dalam membuat LKI 2015. Tanggal cut off ditentukan	Menghasilkan Jurnal Penyesuaian untuk pembuatan Laporan Posisi Keuangan dan

<b>Hari ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Aktivitas Magang</b>	<b>Uraian Tugas</b>	<b>Output</b>
		untuk LKI 2015	tanggal 30 Juni 2015. Namun masih terdapat transaksi yang baru di jurnal setelah tanggal 30 Juni 2015 namun masih mempengaruhi Laporan Posisi Keuangan Bulan Juni 2015. Maka dibuat lah Jurnal Penyesuaiannya.	Laporan Surplus Defisit, Laporan Keuangan Interim 2015
30	Senin 13 Juli 2015	1. Membuat Jurnal Penyesuaian atas Aset untuk LKI 2015	Dalam membuat LKI 2015. Tanggal cut off ditentukan tanggal 30 Juni 2015. Namun masih terdapat transaksi yang baru di jurnal setelah tanggal 30 Juni 2015 namun masih mempengaruhi Laporan Posisi Keuangan Bulan Juni 2015. Maka dibuat lah Jurnal Penyesuaiannya.	Menghasilkan Jurnal Penyesuaian untuk pembuatan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit, Laporan Keuangan Interim 2015
		2. Melakukan penarikan data dari sistem BI SOSA dan di laporkan dalam bentuk Ms. Word	Untuk arsip dibutuhkan data harian dari sistem BI SOSA di setiap akun nya. Oleh karena itu ditariklah data dari sistem lalu kemudian di format ke Ms. Word sebelum akhirnya	Menghasilkan arsip untuk LKI 2015

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang	Uraian Tugas	Output
			di print dan dilampirkan.	
31	Selasa 14 Juli 2015	Meng-update CALK LKI Juni 2015	Terdapat banyak perubahan di CALK LKTBI 2014 dengan CALK LKI 2015 yang sedang dibuat, maka di <i>update</i> lah perubahan-perubahan tersebut.	Menghasilkan <i>update</i> CALK LKI 2015
32	Rabu 15 Juli 2015	Melakukan pemberkasan arsip untuk Laporan Keuangan Interim 2015	Dalam penyusunan LKI 2015 dihasilkan banyak laporan. Untuk itu diperlukan pengarsipan yang rapih supaya mempermudah jika suatu saat memerlukan data tersebut.	Menyusun arsip LKI 2015

### G. Deskripsi Kegiatan Magang

Dalam kegiatan magang pada Divisi APK, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu penyelesaian tahap akhir publikasi buku Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) per 31 Desember 2014 *audited*.

LKTBI tahun 2014 telah selesai diaudit oleh BPK-RI. Untuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit telah dipublikasikan kepada publik melalui media massa pada bulan Mei 2015. Sebelum dilakukan pencetakan buku LKTBI Tahun 2014 *Audited*, perlu dilakukan pengecekan final. Untuk itu, penulis diminta untuk membantu proses penyusunan tahap akhir CALK LKTBI Tahun 2014 yaitu:

1) Pengecekan daftar singkatan

Hal pertama yang dilakukan penulis dalam membantu proses penyelesaian tahap akhir LKTBI 2015 adalah mengecek daftar singkatan yang terdapat pada CALK LKTBI 2015. Dalam CALK LKTBI terdapat puluhan singkatan yang digunakan, untuk itu penulis melakukan pengecekan serta pembuatan daftar singkatan.

Dari seluruh bab CALK tersebut di periksalah singkatan apa saja yang digunakan. Baru setelah diperiksa dan disortir kemudian dibuatkan singkatan tersebut di lampiran daftar singkatan. Syarat yang diberikan untuk pemuatan singkatan dalam lampiran daftar singkatan adalah singkatan tersebut telah digunakan lebih dari sekali dalam CALK LKTBI 2014. Setelah itu baru dibuatlah daftar singkatannya pada lampiran daftar singkatan.

2) Mengecek translasi LKTBI tahun 2014 dalam Bahasa Inggris

Penulis melakukan pengecekan translasi CALK LKTBI 2014 ke bahasa Inggris. Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia tentunya diperlukan oleh banyak kalangan, tak terkecuali kalangan asing. Oleh karena itu CALK LKTBI 2015 juga dibuatkan dalam bahasa Inggris nya. Translasi Bahasa Inggris tersebut juga telah selesai disusun oleh Divisi APK. Namun untuk kesempurnaan sebelum dirilis maka dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu. Pengecekan translasi yaitu baik dari segi struktur paragraf, struktur kalimat, sampai ke pengecekan *grammar* pada CALK bahasa Inggris tersebut. Hal tersebut di cek apakah telah sesuai dengan CALK yang disusun dalam Bahasa Indonesia.

3) Membuat lampiran struktur organisasi

Penulis membuat lampiran struktur organisasi. Struktur organisasi yang telah dibuat dalam Bahasa Indonesia kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dibuat strukturnya dalam bahasa Inggris yang kemudian akan di lampirkan dalam lampiran.

4) Membuat tabel pos-pos akuntansi LKTBI 2014

Hal terakhir yang dilakukan dalam proses penyusunan tahap akhir adalah pembuatan tabel Pos-Pos Akuntansi LKTBI 2014 berserta translasi Bahasa Inggrisnya. Dengan adanya Perubahan acuan Standar Akuntansi Bank Indonesia dari PAKBI (Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia) menjadi KAKBI (Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia) maka terdapat banyak perubahan pos-pos Akuntansi di LKTBI, maka dibuatlah tabel yang menjelaskan perubahan antara Pos-Pos Akuntansi di PAKBI menjadi Pos-Pos Akuntansi yang terdapat pada KAKBI.

Tabel tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap pengertian pos-pos akuntansi yang terdapat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit Bank Indonesia 2014.

Selain itu juga untuk mempermudah pemahaman atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit Bank Indonesia tahun 2013 yang disajikan kembali. Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit Bank Indonesia 2013 yang telah disusun menggunakan PAKBI kemudian disajikan kembali dalam format KAKBI. Terdapat beberapa perubahan mulai dari nama akun, subpos akun, hingga nomor referensinya. Untuk itulah dibuat tabel nya supaya mempermudah pemahaman akan pos-pos akuntansi dalam KAKBI yang baru digunakan pada LKTBI 2014 ini.

b. Membantu proses penyusunan Laporan Keuangan Interim Bank Indonesia (LKIBI) per 30 Juni 2015.

Pada prinsipnya LKI mempunyai struktur pelaporan yang sama dengan LKTBI, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Surplus Defisit, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Secara garis besar yang penulis kerjakan dalam proses penyusunan LKI ini adalah membantu proses penyusunan tahap awal, antara lain:

1) Membuat *format/template* CALK LKI 2015

Penulis membantu mulai dari memformat CALK LKTBI 2014. Struktur CALK LKI 2015 tidak terlalu berbeda dengan struktur LKTBI 2014. Secara keseluruhan format penyusunannya masih sama. Namun yang berbeda adalah angka yang tertera dalam setiap pos dan juga penjelasan mengenai angka-angka tersebut. Untuk setiap bab CALK LKI 2015 dibuat oleh masing-masing Departemen untuk posisi keuangan dan penjelasannya, sesuai dengan bidang atau kegiatan masing-masing departemen yang berpengaruh dengan Laporan Keuangan Bank Indonesia. Setelah itu baru lah dikumpulkan lalu diperiksa dan disusun oleh Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan.

Penyusunan tahap awal adalah mengirimkan memo kepada setiap Departemen. Hal yang dilakukan penulis dalam tahap ini adalah merubah dan menandai bagian apa saja yang harus di minta *update* posisi terakhir per 30 Juni 2015. Setelah diberikan tanda tentang hal apa saja yang harus di *update* pada CALK LKI 2015, barulah Divisi akan mengirimkan memo kepada setiap Departemen yang berisi permintaan *update* terakhir posisi keuangan masing-masing departemen yang terkait dengan LKI 2015 baik di Laporan Posisi Keuangan maupun di Laporan Surplus Defisit. Memo tersebut juga meminta penjelasan masing-masing posisi keuangan tersebut.

2) Meng-*update* CALK LKIBI per 30 Juni 2015

Setelah mendapat balasan dari setiap Departemen terkait posisi keuangan terakhir dan penjelasannya, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun CALK LKI 2015 dengan cara mengupdatenya dari CALK LKTBI 2014. Penulis akan memilah terlebih dahulu data apa saja yang di *update* dan berbeda dengan CALK LKTBI 2014. Jika sudah menemukan *update* dan perbedaan apa saja yang terdapat dalam balasan memo, barulah penulis meng-*update* CALK LKI 2015.

3) Membuat Jurnal Penyesuaian

Selanjutnya yang penulis bantu dalam proses penyusunan LKI 2015 adalah membuat Jurnal Penyesuaian Penerimaan Giro dan Aset Bank Indonesia. Untuk LKI 2015 tanggal *cut-off* nya adalah tanggal 30 Juni 2015. Namun masih terdapat beberapa transaksi yang baru di jurnal pada bulan Juli 2015 yang transaksi tersebut masih terkait dan mempengaruhi posisi keuangan per 30 Juni 2015. Oleh karena itu dibuat lah Jurnal Penyesuaiannya supaya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit nya menggambarkan posisi yang sebenarnya per 30 Juni 2015.

4) Menerjemahkan Bab Manajemen Risiko Bank Sentral Lain

Hal lain yang penulis lakukan adalah menerjemahkan bab Manajemen Risiko dalam CALK dari beberapa Bank Sentral lain, yang berasal dari Bank for International Settlement (BIS), Reserve Bank of Australia (RBA), Reserve Baank of New Zealand (RBNZ), Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP). Tujuan dari hal ini adalah karena Dewan Gubernur menginginkan bab Manajemen Risiko yang lebih lengkap dan mendalam di CALK LKI 2015, maka dibutuhkan refrensi tentang Manajemen Risiko dari Bank Sentral lain dan untuk dijadikan studi banding. Hal tersebut lah yang mendasari pembuatan terjemahan bab Manajemen Risiko Bank Sentral lain sebagai referensi untuk menyusun bab Manajemen Risiko di CALK LKI 2015.

5) Menarik data dari sistem BI-SOSA

Hal terakhir yang dilakukan penulis dalam membantu proses penyusunan LKI 2015 adalah menarik data dari sistem Bank Indonesia-Sentralisasi Otomaso Sistem Akuntansi (BI-SOSA) untuk dijadikan arsip LKI 2015. Untuk arsip dibutuhkan data harian dari sistem BI SOSA di setiap akun nya. Oleh karena itu ditariklah data dari sistem



lalu kemudian di format ke Ms. Word sebelum akhirnya di print dan dilampirkan dan kemudian diarsipkan.

c. Membuat *historical* data Laporan Keuangan Bank Indonesia

Divisi APK belum memiliki *softcopy historical* data Laporan Keuangan Bank Indonesia pada tahun 1981, 1982, 1990, 1992, 1994, 2002, 2003, 2004 dalam bentuk *Microsoft Excel*, oleh karena itu penulis membantu membuat *historical* data dimaksud dalam file *Microsoft Excel*. Hal yang dilakukan oleh penulis adalah mengambil buku Laporan Keuangan tahun 1981, 1982, 1990, 1992, 1994, 2002, 2003, 2004, lalu menginput data Laporan Posisi Keuangan atau Neraca dan Laporan Surplus Defisit atau Laporan Laba Rugi setiap tahunnya ke dalam *Microsoft Excel*.

d. Membuat Rekonsiliasi antara Cadangan Umum dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil monitoring terdapat selisih antara Cadangan Umum dan Rubrik 4 (Realisasi Anggaran), maka dicari penyebabnya dan dibuatkan Rekapitulasinya. Selisih tersebut dapat terjadi karena kesalahan input seperti salah angka penginputan atau terinput berkali-kali. Maka penulis harus mengecek satu-persatu transaksi yang terdapat pada rubrik 4 dan dicocokkan dengan Cadangan Umum, dilihat satu-persatu apakah transaksi telah tercatat pada rubrik 4 dan Cadangan Umum.

Apabila telah ditemukan transaksi apa saja yang salah dan jumlah transaksi tersebut telah sesuai dengan selisih yang diketahui, maka selanjutnya penulis membuat rekapitulasi penyebab selisih tersebut. Rekapitulasi tersebut berupa rekonsiliasi antara rubrik 4 dan Cadangan Umum, yang berisi transaksi yang salah pada rubrik 4 dan Cadangan Umum, kemudian perhitungannya sesuai dengan selisih yang ada, dan terakhir diberi keterangan dan penjelasan mengenai penyebab terjadinya selisih tersebut.

- e. Memformat data Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum tahun 2011-2013 dari sistem ke *Microsoft Excel*

Data yang telah diambil dari sistem BI-SOSA masih berantakan dan belum dapat diolah. Data yang diambil dari sistem BI-SOSA belum dapat diolah kedalam *Microsoft Excel*, maka penulis harus memformat data tersebut supaya dapat diolah dalam Microsoft Excel untuk keperluan selanjutnya.

## **H. Relevansi Teori Dengan Praktek**

Relevansi teori sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II, dengan kegiatan atau produk yang dihasilkan oleh Divisi APK, adalah sebagai berikut:

### **1. Laporan Keuangan**

- a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia kurang lebih sama dengan tujuan pada perusahaan atau instansi lainnya. Hal tersebut terbukti dengan persamaan antara SAK 1994 tentang “Tujuan Laporan Keuangan” dengan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia berdasarkan KAKBI. Keduanya berisi tentang

- 1) Tujuan Laporan Keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut laporan posisi keuangan, kinerja suatu perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun pada Bank Indonesia tujuan laporan keuangan ditambah untuk menunjukkan pencapaian manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.
- 2) Laporan keuangan disusun untuk tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna. Akan tetapi, laporan keuangan Bank Indonesia tidak menyediakan semua informasi yang mungkin diperlukan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan

pengaruh keuangan dari kejadian pada masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

b. Komponen Laporan Keuangan

Terdapat beberapa perbedaan antara komponen laporan keuangan untuk instansi umum dan Bank Indonesia, yang didasarkan pada perbedaan antara PSAK 1 dengan KAKBI Paragraf 7. Pada PSAK 1 komponen Laporan Keuangan yang lengkap harus terdiri dari:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Laporan Keuangan

Sementara pada Bank Indonesia, komponen laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Surplus Defisit
- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Perbedaan terlihat dari Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan, karena Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara.

Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*) Pemerintah. Bank Indonesia tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya tidak tercermin dari kemampuannya dalam menghasilkan kas masa depan. Selain itu, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah sehingga Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

## **2. Penggunaan Rasio Modal Terhadap Kewajiban Moneter Sebagai Dasar Pembagian Surplus ke Pemerintah**

Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia, ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan bahwa:

- a. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
  - 1) 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
  - 2) sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- b. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah.

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Teori yang relevan dengan praktek ini adalah analisis rasio modal, telah dijelaskan bahwa Bank Indonesia harus membayar kewajiban kepada pemerintah apabila rasio modal Bank Indonesia diatas 10% Dengan ketentuan yang akan dialokasikan adalah Surplus Bank Indonesia dengan pembagian untuk Cadangan Tujuan sebesar 30% dan

sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, apabila masih terdapat sisa setelah pengalokasian tersebut maka sisa surplus tersebut harus diserahkan kepada pemerintah. Namun sisa surplus yang merupakan bagian pemerintah tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia.

#### **I. Permasalahan yang dihadapi**

Selama melakukan aktivitas magang, penulis menemukan masalah yang dihadapi Bank Indonesia, yaitu : belum rilisnya LKTBI tahun 2014 dalam Bahasa Inggris. LKTBI tahun 2015 dalam Bahasa Indonesia telah dirilis pada bulan Mei 2015, sementara LKTBI dalam Bahasa Inggris belum dirilis. Hal tersebut dapat menjadi masalah karena pengguna yang membutuhkan LKTBI 2014 dalam Bahasa Inggris masih belum dapat menggunakannya, padahal LKTBI 2014 dalam Bahasa Indonesia telah dirilis tiga bulan yang lalu. Perbedaan rentang waktu yang jauh tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Aktivitas Magang**

Pelaksanaan kegiatan PKL atau magang penulis di Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan, yang merupakan bagian dari Grup Perengaturan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan pada Departemen Keuangan Intern, Bank Indonesia berjalan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Universitas Telkom. Selama melakukan aktivitas magang pada Divisi APK, dapat disimpulkan bahwa kegiatan di Divisi APK sudah berlangsung dengan sangat baik dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan aktivitas magang yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan kegiatan magang adalah:

- a. Membantu penyelesaian tahap akhir publikasi buku Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) per 31 Desember 2014 *audited*.
- b. Membantu proses penyusunan Laporan Keuangan Interim Bank Indonesia (LKIBI) per 30 Juni 2015.
- c. Membuat *historical data* Laporan Keuangan Bank Indonesia
- d. Membuat Rekonsiliasi antara Cadangan Umum dan Realisasi Anggaran
- e. Memformat data Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum tahun 2011-2013 dari sistem ke Microsoft Excel

Pada praktiknya pelaksanaan magang yang dilakukan penulis telah sesuai dengan materi perkuliahan mengenai Pelaporan Keuangan yang terdapat pada mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan, dan Akuntansi Keuangan Lanjutan. Selain itu materi perkuliahan yang sesuai dengan praktek magang kali ini adalah mengenai Analisis Laporan Keuangan.

## **2. Laporan Magang**

Berdasarkan hasil kegiatan magang pada Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan, Departemen Keuangan Intern, Bank Indonesia, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Komponen Laporan Keuangan Bank Indonesia terdiri Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit, dan Catatan Atas Laporan Keuangan
- b. Transaksi Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia sangatlah unik karena berbeda dengan badan atau instansi lain pada umumnya, oleh karena itulah terdapat pengaturan akuntansi khusus Bank Indonesia yang bernama Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia (KAKBI).
- c. Apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah diatas 10% maka Bank Indonesia menyetor sisa surplus. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut: 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan, sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter.
- d. Struktur organisasi Bank Indonesia, khususnya pada Departemen Keuangan Intern telah tertata secara baik. Sehingga secara garis besar Departemen Keuangan Intern Bank Indonesia telah memiliki sistem manajemen yang sangat baik, sehingga seluruh pegawai di Departemen Keuangan Intern dapat saling bahu membahu dalam menjalankan tugasnya dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Rekomendasi untuk Universitas Telkom**

Rekomendasi untuk Universitas Telkom berkaitan dengan penyelenggaraan mata kuliah magang antara lain:

- a. Universitas Telkom harus membangun koneksi dan kerja sama dengan perusahaan dan instansi lain untuk mempermudah mahasiswa

Universitas Telkom dalam mencari perusahaan untuk melaksanakan kegiatan magang. Jangan hanya melepas dan membiarkan mahasiswanya mencari tempat magang sendiri, namun harus diberi arahan dan rekomendasi perusahaan atau instansi yang mau menyelenggarakan program magang.

- b. Universitas Telkom, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi disarankan untuk memberi materi perkuliahan atau pelatihan *Microsoft Office*, khususnya *Microsoft Excel*. Karena untuk kita para mahasiswa akuntansi yang akan melaksanakan magang pada bagian keuangan pastinya akan menggunakan Microsoft Excel untuk kegiatan magangnya. Karena biar bagaimanapun juga Microsoft Excel adalah software paling dasar dalam seluruh kegiatan keuangan. Keterampilan *Microsoft Excel* ini nantinya akan mempermudah para mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang, bahkan akan berguna sampai para mahasiswa Universitas Telkom kerja di perusahaan nantinya.

## **2. Rekomendasi untuk Mahasiswa Universitas Telkom**

Dapat berkerja di Bank Indonesia tentunya merupakan impian untuk banyak orang. Hal ini dapat dimulai dengan magang atau praktek kerja lapangan di Bank Indonesia. Oleh karena itu rekomendasi yang ingin diberikan oleh penulis adalah tata cara untuk melamar magang atau PKL di Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta. Tata cara pengalaman penulis adalah sebagai berikut:

- a. Persiapkan persiapan magang sedini mungkin, jika bisa ketika Semester Genap baru mulai, langsung siapkan perlengkapan magang. Tidak perlu menunggu instruksi kampus terlebih dahulu.
- b. Siapkan surat magang dari kampus yang dapat diperoleh di Bagian Kemahasiswaan. Surat magang ditujukan untuk Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Yang beralamat di Gedung Tipikal Lantai 10. JL. MH, Thamrin No. 2 Jakarta.



- c. Datang paling lambat lima sampai 3 bulan sebelum pelaksanaan magang.
- d. Bawa CV, Nilai Transkrip Terakhir, Fotokopi KTP.
- e. Datang ke Gedung Tipikal Lantai 10, Departemen Sumber Daya Manusia. Dating dengan pakaian kerja yang rapih dan sopan. Tidak diperkenankan menggunakan celana jeans dan sandal.
- f. Setelah bertemu dengan orang dari Departemen Sumber Daya Manusia maka akan diberi petunjuk selanjutnya.
- g. Para calon PKL dapat diberi kepastian langsung apakah dapat magang di Bank Indonesia ataupun harus menunggu terlebih dahulu.

Demikian rekomendasi penulis, semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melakukan magang di Bank Indonesia. Saran dari penulis adalah maganglah pada tempat kerja atau perusahaan yang sesuai dengan hasrat dan *passion* kalian. Karena apabila kalian magang di tempat yang kalian inginkan, percayalah kegiatan magang tersebut akan menjadi menyenangkan dan akan memberikan pengalaman berharga dan tidak akan terlupakan.

### **3. Rekomendasi untuk Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan, Departemen Keuangan Intern, Bank Indonesia**

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan atau magang di Divisi Analisis dan Pelaporan Keuangan, Departemen Keuangan Intern, Bank Indonesia. Divisi APK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap pegawai di Divisi APK telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan *job desknya*. Diharapkan Divisi APK dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah sangat baik ini.

Penulis memberikan saran pada proses translasi Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia dalam bahasa inggris dapat dipercepat. Karena sampai dengan laporan ini dibuat (akhir Juli 2015), LKTBI 2014 dalam bahasa inggris masih belum dirilis ke publik. Sebaiknya LKTBI dapat

dirilis secara bersamaan baik yang Bahasa Indonesia maupun yang Bahasa Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wild, John, & K. R. Subramanyam. (2008). *Financial Statement Analysis*, McGraw-Hill, Diterjemahkan oleh Dewi Yanti, (2010), *Analisis dan Laporan Keuangan*, Salemba 4
- Singleton, John. (2011). *Central Banking in the Twentieth Century*, Cambridge, London
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968. Tentang Bank Sentral
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Tentang Bank Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan*
- Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 31 Juli 2015
- [www.keuanganlism.com](http://www.keuanganlism.com) diakses pada 29 Agustus 2015

**BANK INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013 Disejajarkan Kemembali
<b>ASET</b>			
1. Emas	B.9, E.1	37.441.928	36.757.308
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.11, E.2	1.490.095.581	1.320.110.600
2.1 Surat Berharga dan Taghan dalam Rupiah	B.11, E.2	134.444.810	116.124.369
2.2 Surat Berharga dan Taghan berbasis Syariah dalam Rupiah	B.12, E.2	1.403.251	1.161.504
2.3 Surat Berharga dan Taghan dalam Valuta Asing	B.11, E.2	1.354.247.520	1.202.824.727
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	B.13, E.3	31.731.041	33.060.049
4. Taghan	E.4	230.568.589	237.158.546
4.1 Kepada Pemerintah	B.14, E.4	229.135.648	234.952.818
4.2 Kepada Bank	B.15, E.4	1.432.941	2.205.728
5. Aset Non Kebijakan	E.5	22.951.832	21.588.950
5.1 Penyertaan	B.16, E.5	819.923	850.343
5.2 Aset Keuangan	B.17, E.5	2.122.832	3.435.290
5.3 Aset Tetap dan Lainnya	B.18, E.5	20.009.077	17.303.317
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.812.788.971</b>	<b>1.648.675.453</b>
<b>LIABILITAS</b>			
1. Uang Dalam Peredaran	B.10, E.6	528.549.571	500.030.818
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.11, E.7	880.072.254	765.001.650
2.1 Giro Bank	B.11, E.7	362.383.166	322.527.545
2.2 Surat Berharga yang Dihibahkan dan Utang dalam Rupiah	B.11, E.7	373.103.654	293.894.235
2.3 Surat Berharga yang Dihibahkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	B.12, E.7	31.336.162	21.914.527
2.4 Surat Berharga yang Dihibahkan dan Utang dalam Valuta Asing	B.11, E.7	112.079.884	126.665.343
2.5 Surat Berharga yang Dihibahkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.12, E.7	1.169.388	0
3. Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	B.13, E.8	35.683.248	37.174.934
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	B.14, E.9	69.994.425	60.646.665
4.1 Giro	B.14, E.9	69.931.641	60.569.929
4.2 Pinjaman	B.14, E.9	62.784	76.736
5. Kewajiban Non Kebijakan	B.20, B.31, B.32, E.10	22.501.783	6.454.545
6. Selisih Revaluasi	B.21, E.11	158.268.155	202.878.814
7. Modal	B.22, E.12	2.948.029	2.948.029
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	E.13	114.771.506	73.539.998
8.1 Cadangan Umum	E.13	57.397.040	22.924.506
8.2 Cadangan Tujuan	E.13	16.142.958	13.208.397
8.3 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	E.13	41.231.508	37.407.095
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>1.812.788.971</b>	<b>1.648.675.453</b>

Lampiran 1  
Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

**BANK INDONESIA**  
**LAPORAN SURPLUS DEFISIT**  
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014  
 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	1 Januari s.d. 31 Desember 2014	1 Januari s.d. 31 Desember 2013 (Disajikan Kembali)
<b>PENGHASILAN</b>			
<b>1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter</b>	E.15	<b>89.088.999</b>	<b>68.543.024</b>
1.1. Pendapatan Bunga	B.23, E.15	28.831.434	25.241.045
1.2. Pendapatan Imbalan	B.24, E.15	0	0
1.3. Transaksi Aset Keuangan	B.25, E.15	7.924.352	9.407.287
1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing	B.26, E.15	51.971.100	33.568.134
1.5. Lainnya	E.15	362.113	326.558
<b>2. Pengeluaran Sistem Pembayaran</b>	B.27, E.16	<b>355.189</b>	<b>1.690.743</b>
<b>3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial</b>	B.28, E.17	<b>119</b>	<b>115.439</b>
<b>4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan</b>	B.29, E.18	<b>257.038</b>	<b>272.203</b>
<b>5. Pendapatan Lainnya</b>	E.19	<b>3.399.127</b>	<b>492.019</b>
<b>Jumlah Penghasilan</b>		<b>93.100.472</b>	<b>71.113.428</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter</b>	E.20	<b>23.206.834</b>	<b>18.205.381</b>
1.1. Beban Bunga	B.23, E.20	21.691.645	17.099.846
1.2. Beban Imbalan	B.24, E.20	1.054.449	688.825
1.3. Lainnya	E.20	460.740	416.710
<b>2. Pengeluaran Sistem Pembayaran</b>	B.27, E.21	<b>2.925.977</b>	<b>2.709.357</b>
<b>3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial</b>	B.28, E.22	<b>77.856</b>	<b>169.624</b>
<b>4. Remunerasi kepada Pemerintah</b>	B.30, E.23	<b>3.513.071</b>	<b>2.610.495</b>
<b>5. Beban Umum dan Lainnya</b>	E.24	<b>8.277.725</b>	<b>5.221.080</b>
<b>Jumlah Beban</b>		<b>38.001.463</b>	<b>28.915.937</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK</b>		<b>55.099.009</b>	<b>42.197.491</b>
<b>PAJAK</b>	B.32, E.14	<b>(13.867.501)</b>	<b>(4.790.396)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK</b>		<b>41.231.508</b>	<b>37.407.095</b>

Lampiran 2  
 Laporan Surplus Final Bank Indonesia per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

<b>31 Desember 2013</b>			
<b>Sebagaimana dilaporkan sebelumnya</b>	<i>As Stated Before</i>	<b>Disajikan Kembali</b>	<i>Restated</i>
<i>Aktiva</i>	<i>Assets</i>	<i>Aset</i>	<i>Assets</i>
1. Emas	1. <i>Gold</i>	1. Emas	1. <i>Gold</i>
2. Uang Asing	2. <i>Foreign Currencies</i>	5. Aset Non Kebijakan 5.2. Aset Keuangan	5. <i>Other assets 5.2 Other Financial Assets</i>
3. Hak Tarik Khusus	3. <i>Holdings of Special Drawing</i>	3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Internasional 3.2. Hak Tarik Khusus	3. <i>Receivables from the IMF 3.2. Holding of Special Drawing Rights</i>
4. Giro	4. <i>Demand Deposits</i>	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter. 2.3. Surat Berharga dan Tagihan Dalam Valuta Asing 5. Aset Non Kebijakan 5.2. Aset Keuangan **) <i>Penyisihan Penurunan Nilai Aset</i>	2. <i>Financial assets related to monetary policy implementation 2. 3. Securities held and claims denominated in foreign currency</i>  5. <i>Other assets 5.2 Other Financial Assets</i>  **) <i>Allowance for impairment of financial assets</i>
5. Deposito	5. <i>Time Deposits</i>	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter. 2.4. Surat Berharga dan Tagihan Dalam Valuta Asing **) <i>Penyisihan Penurunan Nilai Aset</i>	2. <i>Financial assets related to monetary policy implementation 2.3 Securities held and claims denominated in foreign currency</i> **) <i>Allowance for impairment of financial assets</i>
6. Surat Berharga	6. <i>Marketable Securities</i>	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter.	2. <i>Financial assets related to monetary policy</i>

		2.5. Surat Berharga dan Tagihan Dalam Valuta Asing **) Penyisihan Penurunan Nilai Aset	<i>implementation</i> 2.3 <i>Securities held and claims denominated in foreign currency</i> **) <i>Allowance for impairment of financial assets</i>
7. Surat Berharga Negara Republik Indonesia	<i>Government Bonds</i>	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter. 2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah 2.2. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	2. <i>Financial assets related to monetary policy implementation</i> 2.1 <i>Securities held and claims denominated in Rupiah</i>  2.2. <i>Sharia-based securities held and claim denominated in Rupiah</i>
8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	8. <i>Securities Purchased Under Resale Agreements</i>	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	2. <i>Financial assets related to monetary policy implementation</i> 2.1 <i>Securities held and claims denominated in Rupiah</i>
9. Tagihan:  9.1. Kepada Pemerintah	9. <i>Claims:</i>  9.1. <i>on Government</i>	4. Tagihan  4.1. Kepada Pemerintah **) <i>Penyisihan Penurunan Nilai Aset</i>	4. <i>Claims</i>  4.1 <i>Claims on the Government</i> **) <i>Allowance for impairment of financial assets</i>
9.2. Kepada Bank	9.2. <i>on Banks</i>	4. Tagihan 4.2. Kepada Bank **) <i>Penyisihan Penurunan Nilai Aset</i>	4. <i>Claims</i> 4.2. <i>Claims on banks</i> **) <i>Allowance for impairment of financial assets</i>
9.3. Kepada Lainnya	9.3. <i>Others</i>	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.3. Surat Berharga	2. <i>Financial assets related to monetary</i> 2.3 <i>Securities</i>

		dan Tagihan dalam Valuta Asing 5. Aset Non Kebijakan 5.2 Aset Keuangan **) Penyisihan Penurunan Nilai Aset	<i>held and claims denominated in foreign currency</i> **) Allowance for impairment of financial assets
10. Penyertaan	<i>10. Equity Participations</i>	5. Aset Non Kebijakan 5.1. Penyertaan	<i>5. Other assets</i> <i>5.1 Participating interest in domestic and international institutions</i>
11. AktivaLain-Lain	<i>11. Other Assets</i>	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing 5. Aset Non Kebijakan 5.2 Aset Keuangan  **) Penyisihan Penurunan Nilai Aset	<i>2. Financial assets related to monetary policy implementation</i> <i>2.3 Securities held and claims denominated in foreign currency</i> <i>5. Other assets</i> <i>5.2 Other Financial Assets</i> **) Allowance for impairment of financial assets
12. Penyisihan Aktiva	<i>12. Allowance for Bad Debts</i>		

Lampiran 3

Daftar Penyajian Kembali Pos-Pos Akuntansi Aset pada LKTBI 2014



<b>31 Desember 2013</b>			
<b>Sebagaimana dilaporkan sebelumnya</b>	<i>As Stated Before</i>	<b>Disajikan Kembali</b>	<i>Restated</i>
<i>Kewajiban</i>	<i>Liabilities</i>	<i>Liabilitas</i>	<i>Liabilities</i>
1. Uang Dalam Peredaran	<i>1. Currency in Circulation</i>	1. Uang Dalam Peredaran	<i>1. Currency in circulations</i>
2. Giro	<i>2. Demand Deposits</i>		
2.1. Pemerintah	<i>2. Government</i>	4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah 4.1 Giro	<i>4. Liabilities to the Government 4.1 Demand Deposits</i>
2.2. Bank	<i>2. Banks</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.1 Giro	<i>2. Financial liabilities related to monetary policy implementation 2.1 Banks demand deposits</i>
2.3. Lainnya	<i>2.3. Others</i>	5. Kewajiban Non Kebijakan 5.1. Giro Lembaga Domestik dan Internasional 4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah 4.1 Giro	<i>5. Other Liabilities 5.1 Demand deposits from domestic and international institutions 4. Liabilities to the Government 4.1 Demand Deposits</i>
3. Sertifikat Bank Indonesia	<i>3. Bank Indonesia Certificates</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	<i>2. Financial liabilities related to monetary policy implementation 2.2 Securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	<i>4. Bank Indonesia Sharia Certificates</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	<i>2. Financial liabilities related to monetary policy implementation 2.3. Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>

5. Penempatan Berjangka	5. <i>Term Deposits</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.4 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	2. <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i> 2.4 <i>Securities issued and liabilities denominated in foreign currency</i>
6. Penempatan Dana	6. <i>Deposit Facilities</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	2. <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i> 2.2 <i>Securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	7. <i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	2. <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i> 2.3. <i>Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>
8. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	8. <i>Securities Sold Under Repurchase Agreements</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah 2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	2. <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i> 2.2 <i>Securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i> 2.3 <i>Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>
9. Pinjaman dari Pemerintah	9. <i>Loans from Government</i>	4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah 4.2 Pinjaman	4. <i>Liabilities to the Government</i> 4.2 <i>Borrowings from Government</i>
10. Pinjaman Luar	10. <i>Foreign</i>	2. Liabilitas Keuangan	2. <i>Financial</i>

Negeri	<i>Borrowings</i>	untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.4 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	<i>liabilities related to monetary</i> 2.4 <i>Securities issued and liabilities denominated in foreign currency</i>
11. Alokasi Hak Tarik Khusus	<i>11. Allocation of Special Drawing Rights</i>	3. Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	<i>3. Counterpart of Special Drawing Rights allocated by the IMF</i>
12. Kewajiban Lain-Lain	<i>12. Other Liabilities</i>	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter 2.4 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing 4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah 4.1 Giro 4.2 Pinjaman 5. Kewajiban Non Kebijakan 5.2 Imbalan Pasca Kerja 5.3 Lainnya	<i>2. Financial liabilities related to monetary</i> 2.4 <i>Securities issued and liabilities denominated in foreign currency</i> <i>4. Liabilities to the Government</i> 4.1 <i>Demand Deposits</i> 4.2 <i>Borrowings from Government</i> <i>5. Other Liabilities</i> 5.2 <i>Employee benefits</i> 5.3 <i>Others</i>
<b>Ekuitas</b>	<b><i>Equity</i></b>		
1. Modal	<i>1. Capital</i>	6. Selisih Revaluasi 6.4. Lainnya 7. Modal	<i>6. Revaluation Reserves</i> 6.4 <i>others</i> <i>7. Capital</i>
2. Cadangan Umum	<i>2. General Reserves</i>	8. Akumulasi Surplus/Defisit 8.1. Cadangan umum	<i>8. Accumulated Surplus/Deficit</i> 8.1 <i>General Reserves</i>
3. Cadangan Tujuan	<i>3. Statutory Reserves</i>	8. Akumulasi Surplus/Defisit 8.2. Cadangan Tujuan	<i>8. Accumulated Surplus/Deficit</i> 8.2 <i>Statutory Reserves</i>
4. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	<i>4. Unrealized Gains/Losses</i>	6. Selisih Revaluasi 6.1. Selisih Revaluasi Emas	<i>6. Revaluation Reserves</i> 6.1 <i>Gold</i>

		6.2. Selisih Revaluasi Perubahan Kurs Valas 6.3. Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	<i>revaluation 6.2 Foreign currency revaluation 6.3 Financial instruments revaluation</i>
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	<i>5. Current Year Surplus (Deficit)</i>	8. Akumulasi Surplus/Defisit 8.3 Surplus/Defisit Tahun	<i>8. Accumulated Surplus/Deficit 8.3 Current Year Surplus or Current Year Deficit</i>

Lampiran 4

Daftar Penyajian Kembali Pos-Pos Akuntansi Kewajiban pada LKTBI 2014